



Pendampingan Pengurusan NIB SMK Muhammadiyah 2 Desa Ketanon, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung

Achmad Syaiful Hidayat Anwar¹, Ghina Harventy², Mudrifah³
Universitas Muhammadiyah Malang, Indonesia^{1,2,3}

E-mail : asyaiful@umm.ac.id¹ gharventy@umm.ac.id² mudrifah@umm.ac.id³

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk melakukan penataan (perbaikan) ulang pada Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) di Kabupaten Tulungagung yaitu SMK Muhammadiyah 2 yang berlokasi di Desa Ketanon, Kecamatan Kedungwaru Kabupaten Tulungagung. Penataan ulang AUM tersebut terkait dengan keberadaan dan profil AUM yang akan dijadikan sebagai dasar untuk pemutakhiran database AUM. Berdasarkan aktivitas pendampingan terkait dengan pengurusan ijin pendirian, NIB, NPWP, dan pengelolaan keuangan dapat diinformasikan bahwa untuk ijin pendirian dan NPWP telah dilakukan oleh pengelola SMK Muhammadiyah 2 Tulungagung. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya dokumen pengesahan pendirian, ijin perpanjangan operasional, dan NPWP. Namun berkenaan dengan pendaftaran NIB belum tuntas dan masih dalam proses menunggu konfirmasi dari PDM dan PP Muhammadiyah. Pengelolaan keuangan di SMK Muhammadiyah 2 Tulungagung terlaksana dengan baik namun perlu didukung dengan adanya aplikasi yang menunjang keefektifan pelaporan keuangan. Status kepemilikan lahan atas aset tanah yang digunakan oleh AUM perlu adanya penegasan mengingat tanah tersebut merupakan tanah hibah dan berdampak pada besaran PBB yang harus dibayarkan oleh pihak sekolah. Terakhir, berkenaan dengan kewenangan penerbitan SK pendirian AUM perlu disinkronkan, dievaluasi dan ditata kembali.

Kata kunci: amal usaha muhammadiyah, ijin pendirian, nomor induk berusaha, NPWP

Abstract

This community service activity aims to rearrange the Muhammadiyah Business Charity (AUM) in Tulungagung Regency, namely SMK Muhammadiyah 2, which is located in Ketanon Village, Kedungwaru District, Tulungagung Regency. Based on the assistance activities related to managing the establishment permit, NIB, NPWP, and financial management, it can be informed that the establishment permit and NPWP have been carried out by the manager of SMK Muhammadiyah 2 Tulungagung. This is evidenced by documents for the legalization of establishment, permits for an operational extension, and an NPWP. However, the NIB registration has not yet been completed and is still in the process of waiting for confirmation from PDM and PP Muhammadiyah. Financial management at SMK Muhammadiyah 2 Tulungagung is carried out well but needs to be supported by an application that supports financial reporting effectiveness. The land ownership status of the land assets used by AUM needs confirmation considering that the land is a granted land and impacts the amount of PBB that must be paid by the school. Finally, concerning the authority to issue AUM establishment SK, it needs to be synchronized, evaluated, and reorganized.

Keywords: muhammadiyah business charity, establishment permit, business registration number, NPWP

Copyright (c) 2020 Achmad Syaiful Hidayat Anwar, Ghina Harventy, Mudrifah

✉ Corresponding author

Address : Universitas Muhammadiyah Malang

Email : mudrifah@umm.ac.id

Phone : 081336111299

DOI : <https://doi.org/10.31004/abdidas.v1i6.114>

ISSN 2721- 9224 (Media Cetak)

ISSN 2721- 9216 (Media Online)

PENDAHULUAN

Anggaran Dasar (AD) Muhammadiyah pasal 7 ayat 1 dinyatakan bahwa Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) merupakan usaha Muhammadiyah yang mencakup segala bidang kehidupan, sebagai perwujudan pelaksanaan dakwah amar ma'ruh nahi munkar dan tajdid untuk mencapai maksud dan tujuan Muhammadiyah. Penyelenggaraan AUM tersebut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) Muhammadiyah (Kamaruddin dan Idris, 2015). Dalam ART disebutkan bahwa Muhammadiyah memiliki 14 jenis AUM yang terklasifikasi menjadi 5 bidang. Kelima bidang tersebut yaitu bidang agama, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, politik kenegaraan, serta ekonomi dan keuangan (Saguni, 2018). Amal usaha bidang pendidikan mencakup TK (19.181), SD (1.094), MI (1.209), SMP (1.128), MTs (521), SMA (558), SMK (554), Pesantren (184), dan Perguruan Tinggi (169). Amal usaha bidang kesehatan meliputi Rumah Sakit (103) dan Klinik (227). Berdasarkan informasi dari Pengurus PDM Kabupaten Tulungagung, jumlah AUM di Kabupaten Tulungagung berjumlah 75 AUM yang terdiri dari AUM bidang pendidikan dan kesehatan. SMK Muhammadiyah 2 Tulungagung yang berlokasi Desa Ketanon, Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung merupakan AUM di bidang pendidikan yang dijadikan sebagai mitra dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

Sebagian AUM di Tulungagung telah mengurus izin pendirian usaha dan NPWP. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang

berpotensi menimbulkan permasalahan terkait dengan operasional AUM. Beberapa kendala tersebut yaitu pertama, pada akte pendirian AUM, nama AUM terdaftar atas nama yayasan BUKAN persyarikatan. Hal tersebut tentunya tidak sesuai dengan bentuk organisasi Muhammadiyah yang berbentuk persyarikatan dan dapat memengaruhi operasional AUM. Kedua, terdapat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang memberikan NPWP pada AUM dengan NPWP cabang dan ada juga KPP yang memberikan NPWP AUM dengan NPWP pusat. Ketiga, database, pelaporan keuangan, dan perpajakan AUM belum memadai. Kondisi tersebut bila tidak diperbaiki dapat memengaruhi kegiatan operasional AUM. Terlebih lagi setelah diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 24/2018 yang mengatur tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik mengharuskan seluruh lembaga usaha memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan NPWP (Firdausyi, 2017).

Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah nomor induk yang wajib dimiliki semua komponen lembaga usaha baik yang profit maupun non-profit (Mayasari, 2018). NIB digunakan untuk pengajuan izin pendirian dan perpanjangan AUM, izin prodi baru, izin IMB, izin ruang operasi dan izin yang lain. NPWP merupakan nomor yang diberikan kepada wajib pajak untuk kepentingan administrasi perpajakan. Terkait dengan AUM, NPWP bertujuan untuk kepentingan pelaporan dan pengawasan tentang perpajakan AUM walau pun usaha yang dikelola termasuk usaha non-profit (Isroah, 2013). Regulasi tersebut diberlakukan pada 20 sektor usaha sebagai berikut:

Tabel 1. Sektor Usaha Terdampak Regulasi Pelayanan Perizinan Berusaha

Sektor Usaha	
1) Ketenagalistrikan	11) Komunikasi dan Informatika
2) Pertanian	12) Keuangan
3) LHK	13) Pariwisata
4) PUPR	14) Pendidikan dan Kebudayaan
5) Kelautan dan Perikanan	15) Pendidikan Tinggi
6) Kesehatan	16) Keagamaan
7) Obat dan Makanan	17) Ketenagakerjaan
8) Perindustrian	18) Kepolisian
9) Perdagangan	19) Koperasi dan UMKM
10) Perhubungan	20) Nuklir

Kepemilikan NIB dan NPWP dapat menunjang kelancaran operasional dan keberlanjutan AUM. Jika tidak, maka hal tersebut dapat memengaruhi aktivitas AUM. Misalnya pada AUM di bidang pendidikan yang tidak memiliki NIB. Jika hal tersebut terjadi, maka AUM tersebut tidak dapat menerima siswa baru, tidak mendapatkan BOP (Bantuan Operasional Pendidikan), sekolah dibekukan atau digabungkan dengan sekolah lain, tidak dapat membuka jurusan baru (SMK), hingga pihak sekolah tidak diizinkan menandatangani ijazah. Demikian halnya dengan AUM di bidang kesehatan. Jika AUM tersebut belum memiliki NIB, maka izin operasional klinik tidak diberikan, tidak bisa diperpanjang, dan BPJS akan diputus.

Situasi tersebut kemudian mendasari pentingnya kegiatan pengabdian ini dilakukan. Setelah pengabdian selesai diharapkan dapat menjadikan SMK Muhammadiyah 2 lebih tertata dan secara operasional lebih baik sehingga pencapaian tujuan pendirian SMK Muhammadiyah 2 tersebut dapat terwujud.

Secara umum permasalahan yang dihadapi SMK Muhammadiyah 2 Desa Ketanon adalah sebagai berikut:

1. Ijin pendirian
2. Belum memiliki NPWP
3. Belum mengurus NIB
4. Database belum terstruktur
5. Penyajian laporan keuangan yang belum dibuat
6. Laporan keuangan belum terstandar

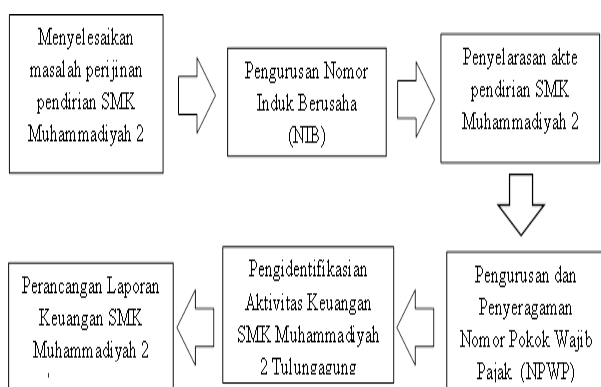
Penyelenggaraan pengabdian ini memiliki target yaitu pertama, kelengkapan dan ketertiban administrasi SMK Muhammadiyah 2 terutama kesesuaian dengan regulasi dan ART Muhammadiyah. Kelengkapan dalam hal ini mengacu pada ketersediaan dan jenis dokumen yang harus dimiliki oleh SMK Muhammadiyah 2. Ketertiban memfokuskan pada keteraturan dan ketertataan data dan/atau dokumen SMK Muhammadiyah 2 termasuk juga kesesuaian dengan regulasi dan ART Muhammadiyah. Kedua, kepemilikan NIB dan keseragaman NPWP guna menunjang kelancaran operasional SMK Muhammadiyah 2. Ketiga, ketersediaan database dan laporan keuangan untuk mendukung kegiatan perencanaan, operasional, dan pembuatan keputusan.

METODE

Kegiatan pendampingan dilakukan multitahun yang didasarkan pada target pengabdian. Metode pendekatan pada kegiatan pengabdian ini menggunakan metode ceramah (presentasi), dialog, pelatihan, dan pendampingan. Metode presentasi bertujuan untuk memberikan

gambaran dan pemahaman kepada penanggung jawab dan pengelola SMK Muhammadiyah 2 mengenai urgensi legalitas dan aspek formal lain yang terkait dengan operasional SMK Muhammadiyah 2. Guna lebih meningkatkan pemahaman penanggung jawab dan pengelola dan untuk mengonfirmasi hal-hal yang masih belum jelas akan dilakukan dialog dengan pihak pengelola SMK Muhammadiyah 2. Selanjutnya, akan dilakukan pelatihan agar penanggung jawab dan pengelola SMK Muhammadiyah 2 dapat memahami dan menguasai mekanisme dan prosedur perijinan, pengurusan NIB, NPWP, penyusunan laporan keuangan dan perpajakan secara praktik. Kegiatan berikutnya yaitu pendampingan untuk mengontrol dan mengevaluasi kegiatan operasional SMK Muhammadiyah 2.

Rangka pemecahan masalah yang dirancang untuk menunjang pencapaian tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat dirumuskan sebagai berikut:



Gambar 1. Rancangan Kegiatan

Untuk kepentingan tersebut, tugas dan tanggung jawab tim pengabdian didistribusikan

sebagai berikut:

1. Ketua
 - Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat
 - Menyusun draf proposal pengabdian kepada masyarakat dan mendiskusikan dengan anggota dan mahasiswa yang dilibatkan dalam kegiatan pengabdian.
 - Memimpin dan mengoordinir pelaksanaan pengabdian di lokasi mitra
 - Menyusun laporan kegiatan pengabdian
 2. Anggota
 - Berkoordinasi dengan ketua dalam hal penyusunan draf proposal
 - Mengurus surat pernyataan kesediaan mitra
 - Menyediakan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan
 - Membantu ketua dalam menyusun laporan kegiatan pengabdian
 3. Mahasiswa
 - Berkoordinasi dengan ketua dan anggota pada saat penyusunan draf proposal
 - Memelajari petunjuk teknis pengurusan ijin pendirian, NIB, dan NPWP
 - Membantu ketua dan anggota pada saat pelaksanaan kegiatan pelatihan di lokasi mitra dan penyusunan laporan akhir kegiatan
- Guna menunjang pencapaian tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diperlukan dukungan, partisipasi, dan kerjasama dengan penanggung jawab dan pengelola SMK Muhammadiyah 2 Tulungagung. Dukungan dan partisipasi tersebut berupa perijinan, penyediaan (pemberian) data dan/informasi yang dibutuhkan,

kesediaan untuk mengikukti kegiatan koordinasi, tempat pelatihan, dan kegiatan lain yang menjadi rangkaian kegiatan pengabdian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

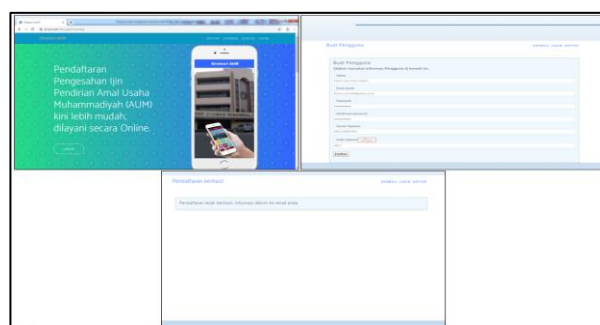
Pendampingan SMK Muhammadiyah 2 Tulungagung merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat lanjutan yang bertujuan untuk menata kembali terkait dengan keorganisasian dan pelaporan keuangan. Hal tersebut penting dilakukan karena Amal Usaha Muhammadiyah (AUM) merupakan perwujudan dakwah amar ma'ruh nahi munkar dan tajdid guna mencapai maksud dan tujuan Muhammadiyah. Melalui kegiatan tersebut diharapkan menunjang kelancaran aktivitas operasional sekolah dan peningkatan mutu AUM terutama di bidang pendidikan. Penataan kembali yang dilakukan berkenaan dengan kelengkapan dokumen keorganisasian meliputi pengesahan ijin pendirian, pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB), penyelarasan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan standardisasi laporan keuangan. Jika persyaratan tersebut belum terpenuhi, maka AUM akan menghadapi beberapa risiko sebagai berikut:

1. Ijin operasional tidak bisa diperpanjang
2. Ijin pembukaan jurusan baru tidak dapat diterbitkan
3. Tidak dapat melaksanakan akreditasi
4. Sertifikat penambahan kompetensi keahlian baru tidak dapat diterbitkan
5. Sekolah dibekukan atau digabungkan dengan sekolah lain (merger).

Tahap kegiatan awal yang dilakukan oleh tim pengabdian yaitu melakukan pendampingan

terhadap penyelesaian pengurusan kelengkapan dokumen keorganisasian. Kegiatan tersebut dilakukan secara kolektif dan juga dihadiri oleh Bapak Dr. Anang Imam Massa Arief, M. Kes selaku Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kabupaten Tulungagung. Target yang dicapai yaitu keterlaksanaan pengurusan ijin pendirian, pengurusan NIB, dan NPWP, khususnya untuk SMK Muhammadiyah 2 Tulungagung.

Pengurusan perijinan secara online melalui alamat <https://sk-aum.id>. Dalam hal ini peserta menunggah seluruh dokumen terkait dengan persyaratan ijin pendirian, NIB, dan NPWP.



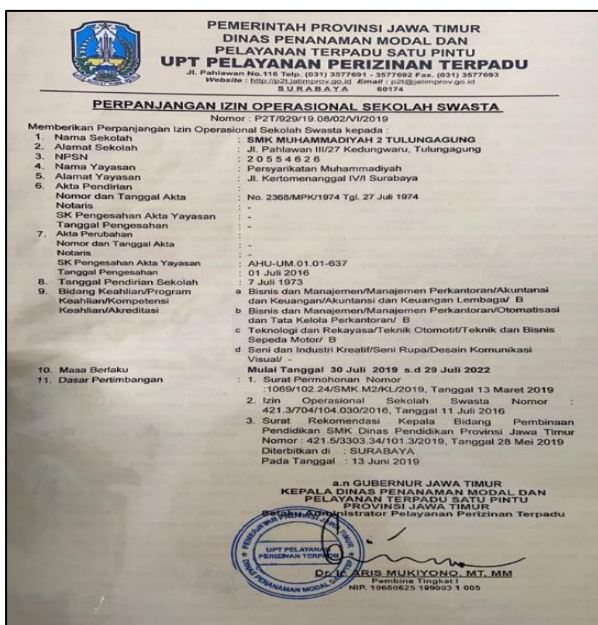
Gambar 2. Tampilan website pengajuan ijin pendirian, NIB, dan NPWP



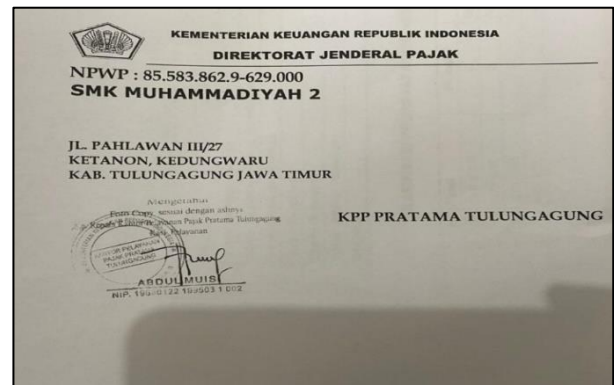
Gambar 3. Tim PKMI dan Pengelola AUM

Terkait dengan pengurusan ijin pendirian yaitu AUM yang sedang mengurus ijin pendirian baru atau AUM yang sedang mengurus perpanjangan ijin operasional. SMK Muhammadiyah 2 Tulungagung termasuk AUM yang telah mengurus perpanjangan ijin operasional. Pengurusan NPWP juga sudah selesai dan telah di atasnamakan SMK Muhammadiyah 2 untuk kepentingan pelaporan penghasilan kena pajak dan SPT tahunan.

Namun demikian, berkenaan dengan pengurusan NIB belum selesai dan belum ada konfirmasi lebih lanjut via email mengenai permasalahan yang berhubungan dengan keterlambatan diterbitkannya NIB. Hal tersebut sedang dikonfirmasi oleh Tim PKMI kepada Pimpinan Wilayah Muhammadiyah guna memperoleh informasi terkait dengan tindak lanjut terhadap keterlambatan tersebut.



Gambar 4. Surat Perpanjangan Izin Operasional



Gambar 5. NPWP SMK Muhammadiyah 2 Tulungagung

Tahapan kegiatan pengabdian berikutnya yaitu mengevaluasi perkembangan penyelesaian pengurusan ijin pendirian, NIB, NPWP, dan mengidentifikasi aktivitas pengelolaan keuangan dengan melakukan *Focus Group Discussion* (FGD). Aktivitas FGD dilakukan pada Senin, 30 Agustus 2020 yang dihadiri oleh Bapak Lukman Subodro (Kepala Sekolah), Bapak Iksanul Afif (Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana), Ibu Sulis Setiyowati (Kepala Tata Usaha), Ibu Krisna Mandraningrum (Bendahara), dan tim PMM UMM. Pada kegiatan tersebut, TIM PMM mengevaluasi perkembangan yang telah dicapai terkait dengan pengurusan ijin pendirian, NIB, dan NPWP.



Gambar 5. Aktivitas FGD

Berdasarkan informasi dari pelaksanaan FGD tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi pengelola SMK Muhammadiyah 2 Tulungagung dan juga AUM bidang pendidikan lain di Tulungagung. Permasalahan pertama berkenaan dengan belum tuntasnya pengurusan NIB yang dapat memengaruhi aktivitas operasional yaitu perpanjangan ijin operasional AUM, pengurusan IMB, pembukaan prodi baru, izin ruang operasi, dan penandatanganan ijazah. Pada saat kepala sekolah hendak mengurus kembali NIB yang belum tuntas tersebut tidak dapat dilakukan karena namanya sudah dipakai untuk mendaftarkan NIB/NPWP AUM. Penyelesaian masalah tersebut telah dilakukan yaitu dengan mengkonfirmasi kepada Pimpinan Daerah dan Wilayah Muhammadiyah dan sedang menunggu ditindaklanjuti dari ketua PDM dan PWM.

Permasalahan kedua yaitu ditemukan terdapat ketidakjelasan kepemilikan atas aset tanah yang digunakan oleh AUM karena tanah tersebut merupakan tanah hibah. Tanah Hibah lokasi SMK bergabung dengan Sekolah Tinggi Muhammadiyah Tulungagung. Hal tersebut berdampak pada besaran PBB yang harus dibayarkan oleh pihak sekolah dan batasan penggunaan bangunan. Dengan demikian, perlu dilakukan penegasan terhadap status kepemilikan lahan atau bangunan agar tidak menghambat aktivitas operasional sekolah.

Permasalahan ketiga terkait dengan ketidaksinkronan berkenaan dengan kewenangan penerbitan SK pendirian AUM, misalnya PAUD dibuat oleh PCM sedangkan SD dan SMP dibuat

oleh PDM. Dalam hal ini, perlu dievaluasi dan ditata kembali mengenai mekanisme dan pendelegasian kewenangan penerbitan SK pendirian AUM.

Pengelolaan keuangan di SMK Muhammadiyah 2 Tulungagung terlaksana dengan baik. Hal tersebut didasarkan pada pelaporan keuangan yang lengkap dan dilaporkan secara periodic, bendahara yang mengelola dana BOS dan dana internal sekolah telah dipisahkan. Laporan keuangan dan dokumen pendukung yang harus dibuat meliputi rencana kegiatan dan anggaran sekolah, buku kas umum, realisasi penggunaan dana tiap sumber dana, rekapitulasi realisasi penggunaan dana, laporan asset, dan laporan ke cabang dinas pendidikan terkait dengan pengelolaan dana BOS. Buku pembantu yang dibuat bendahara yaitu buku pembantu kas, buku pembantu pajak, buku pembantu bank, opname kas dan berita acara pemeriksaan kas.

Namun demikian, mekanisme pelaporan keuangan di SMK Muhammadiyah 2 Tulungagung masih dilakukan secara manual. Pengelola sekolah berharap ada aplikasi sederhana yang dapat digunakan oleh bendahara agar pelaporan keuangan lebih efektif dan sistematis. Pihak sekolah juga berharap ada kegiatan pendampingan terkait dengan penyusunan laporan keuangan terutama pelaporan keuangan yang berbasis computer (tersistem).

SIMPULAN

Pendampingan SMK Muhammadiyah 2 Tulungagung merupakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat lanjutan yang bertujuan untuk

menata kembali terkait dengan keorganisasian dan pelaporan keuangan. Berdasarkan aktivitas pendampingan terkait dengan pengurusan ijin pendirian, NIB, NPWP, dan pengelolaan keuangan dapat diinformasikan bahwa untuk ijin pendirian dan NPWP telah dilakukan oleh pengelola SMK Muhammadiyah 2 Tulungagung. Pengelolaan keuangan di SMK Muhammadiyah 2 Tulungagung terlaksana dengan baik. Namun demikian, mekanisme pelaporan keuangan di SMK Muhammadiyah 2 Tulungagung masih dilakukan secara manual.

DAFTAR PUSTAKA

- Firdausyi, I. R. (2017) “Perkembangan Persyarikatan dan Amal Usaha Muhammadiyah Cabang Merden Purwanegara Banjarnegara,” *Jurnal Khazanah Pendidikan*, X(2).
- Isroah (2013) “Perhitungan Pajak Penghasilan Bagi UMKM,” *Jurnal Nominal*, II(1), hal. 1689–1699.
- Kamaruddin dan Idris, M. (2015) “Eksistensi dan Peranan Persyarikatan Muhammadiyah Terhadap Perkembangan Pendidikan Islam,” *Jurnal Istiqra’*, III(September), hal. 217–243.
- Mayasari, I. (2018) “Online Single Submission Policy in The Framework of The Acceleration and Enhancement of Capital and Business,” *ICASPGS*, hal. 98.
- Saguni, M. K. (2018) “Muhammadiyah Paradigma Gerakan Sosial Keagamaan,” *Jurnal Nukhbatul 'Ulum*, 4(2), hal. 21–30.